

**ANALISIS POLITIK IDENTITAS DALAM PEROLEHAN SUARA PETAHANA
PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH TAHUN 2020 DI KECAMATAN
SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO PROVINSI JAWA TIMUR**

Rohman Wahyu Saputro

NPP. 30.0845

Asdaf Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur

Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email: rohmanwahyusaputro@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Drs. Hadi Prabowo, MM

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The reduced votes of the incumbent in the general election for the head of the Ponorogo district in 2020 which resulted in the incumbent not being re-elected is an interesting discussion. On paper, the incumbent is favored by pocketing the support of 6 political parties and 36 seats in the Regional People's Representative Council. In the regional head general election contestation, identity politics is often used to attract public sympathy with various strategies. Approaches can be made to religious, cultural, and bureaucrat leaders to gain support. These three forms of society, in Clifford Geertz's view, are referred to as abangan, santri, and priyayi societies.* **Purpose:** *This study aims to determine the causes of the loss of public interest in incumbents.* **Method:** *This study uses a descriptive qualitative method with an inductive approach with primary data as a source of data obtained from interviews. The theory used to analyze this research is Niffeneger's 4P Political Marketing Theory.* **Result:** *The results of this study indicate that the incumbent challengers in the 2020 Ponorogo district head general election are closer to the community, especially the abangan, santri and priyayi communities. The incumbent challenger's personality is considered to be simpler and does not seem elitist because he is able to blend in with society.* **Conclusion:** *Community interest in incumbents is reduced due to several things such as the reyog art performance policy "11's" not going well because it is a bit burdensome for the community related to funding activities, reduced interest of the state civil apparatus towards incumbents and the lack of road infrastructure development in the Sampung sub-district.*

Keywords: **Identity Politics, Incumbents, Regional Head General Elections, 4P Political Marketing**

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Berkurangnya suara petahana pada pemilihan umum kepala daerah kabupaten ponorogo tahun 2020 yang berujung pada tidak terpilihnya kembali petahana menjadi pembahasan yang menarik. Diatas kertas petahana diunggulkan dengan mengantongi dukungan dari 6 partai politik serta 36 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pada kontestasi pemilihan umum kepala daerah, politik identitas seringkali digunakan untuk menarik simpati masyarakat dengan berbagai strategi. Pendekatan dapat dilakukan kepada tokoh agama, budaya, maupun birokrat untuk memperoleh dukungan. Ketiga bentuk masyarakat ini dalam pandangan Clifford Geertz disebut sebagai masyarakat abangan, santri, dan priyayi. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui penyebab hilangnya ketertarikan masyarakat kepada petahana. **Metode:** Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif dengan data primer sebagai sumber data yang didapatkan dari hasil wawancara. Teori yang digunakan untuk menganalisis pada penelitian ini adalah Teori Marketing Politik 4P oleh Niffeneger. **Hasil/Temuan:** Penelitian menunjukkan bahwa penantang petahana pada pemilihan umum kepala daerah kabupaten ponorogo tahun 2020 lebih dekat dengan masyarakat khususnya masyarakat abangan, santri maupun priyayi. Personal penantang petahana dinilai lebih sederhana dan tidak terkesan elitis karena mampu berbaur dengan masyarakat. **Kesimpulan:** Ketertarikan masyarakat terhadap petahana berkurang karena beberapa hal seperti kebijakan pentas seni reyog “11-an” kurang berjalan dengan baik karena sedikit memberatkan masyarakat terkait pendanaan kegiatan, berkurangnya minat aparatur sipil negara terhadap petahana serta minimnya pembangunan infrastruktur jalan di kecamatan sampung.

Kata kunci: Politik Identitas, Petahana, Pemilihan Umum Kepala Daerah, Marketing Politik 4P

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan umum kepala daerah dilakukan masyarakat dengan berbagai pertimbangan dan penilaian sesuai dengan hati nurani tanpa adanya paksaan dalam memilih oleh pihak manapun. Survei yang telah dilakukan oleh Sharma, dkk (dalam Sofianto, 2015:162) yang difasilitasi oleh IFES (*International Foundation for Electoral System*) tentang pemilihan umum terhadap masyarakat Indonesia memberikan pandangan bahwa 62% masyarakat Indonesia berpendapat jika agama mempunyai pengaruh yang penting pada politik. Rinciannya adalah

44% masyarakat Indonesia berpandangan bahwa agama mempengaruhi dalam pengambilan keputusan politik, dan 18% berpendapat bahwa agama tidak berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Dapat dilihat berdasarkan data diatas bahwa identitas menjadi patokan dalam penentuan keputusan politik masyarakat Indonesia pada kontestasi politik yang mengarah pada pemilihan umum kepala daerah. Hal inilah yang kemudian mendukung adanya politik identitas. Menurut Nasrudin (2019:37) teori mengenai politik identitas serta berbagai hasil penelitian menggambarkan bahwa isu etnis, agama menjadi menarik dan muncul (*salient*) untuk digunakan dan berpengaruh pada proses politik. Pada Jurnal Badan Pengawas Pemilu, Herdiansah (2017:178) menjelaskan bahwa pasca pemilihan Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017 setelah kemenangan Anis-Sandi seolah membuktikan jika politik identitas dapat dijadikan kekuatan yang efektif untuk melawan kekuatan politik yang dominan. Perolehan suara yang berdampak pada kemenangan dan kekalahan petahana dapat dilihat dari masyarakat jawa yang terbagi secara kultural yang menurut Clifford Geertz terdiri dari masyarakat abangan, santri, dan priyayi. Dimana masyarakat ini dapat digunakan sebagai obyek politik identitas dari pasangan calon untuk mendapatkan suara dari masing-masing kelompok masyarakat tersebut dengan mendekati orang yang berpengaruh seperti tokoh agama di pesantren, tokoh budaya setempat, dan pimpinan dalam birokrat.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP PENELITIAN)

Pemilihan umum kepala daerah yang diselenggarakan secara serentak di Kabupaten Ponorogo pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 mengunggulkan petahana dengan mengantongi dukungan dari 6 partai politik dan 36 kursi DPRD, sedangkan paslon nomor urut 1 hanya didukung oleh 4 partai politik dan 9 kursi DPRD. Partai politik pendukung seperti Nasdem, PKB, dan Gerindra merupakan partai dengan pemilih terbanyak pada pemilihan legislatif tahun 2019 yang lalu, terdapat 6 (enam) daerah pemilihan di kabupaten ponorogo yang meliputi 21 kecamatan. Ketiga partai politik pendukung petahana ini berada dalam 3 besar perolehan suara pemilih dan bergantian menjadi partai dengan pemilih terbanyak disetiap daerah pemilihannya masing-masing.

Tabel 1.1

Data Parpol Peroleh Suara Terbanyak pada Pileg 2019 Kabupaten Ponorogo

No	Daerah Pemilihan	Partai Politik Pemenang	Perolehan Suara
1	DAPIL I	Kebangkitan Bangsa	21.357

2	DAPIL II	Nasional Demokrat	27.328
3	DAPIL III	Demokrat	22.908
4	DAPIL IV	Nasional Demokrat	20.413
5	DAPIL V	Nasional Demokrat	20.372
6	DAPIL VI	Nasional Demokrat	29.244

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan diolah oleh penulis

Dari tabel diatas, Partai Nasional Demokrat (Nasdem) mendominasi di 4 daerah pemilihan (Dapil) pada pemilihan legislatif tahun sebelumnya. Ini dapat menunjukkan bagaimana kuatnya basis massa yang ditunjukkan oleh besarnya perolehan suara parpol pengusung petahana. Partai pengusung yang mempunyai banyak suara dimasyarakat tentu saja menguntungkan petahana dalam kemenangan pemilu selanjutnya.

Kekuatan petahana diatas kertas lebih diunggulkan daripada pasangan calon penantangannya. Masyarakat akan lebih mengetahui karakteristik pasangan calon dengan pengusung partai terbanyak, terlebih lagi yang dimunculkan ke publik adalah petahana yang notabenehnya sudah dikenal selama periode menjabatnya. Kecamatan sampung adalah salah satu kecamatan yang mempunyai selisih perolehan suara terbanyak antara 2 pasangan calon yang bertarung pada Pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020.

Tabel 1.2

Perolehan Suara Kedua Pasangan Calon Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 di Kecamatan Sampung

Nomor Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase	Selisih Perolehan Suara
1	Sugiri Sancoko-Lisdyarita	17.479	70,2%	40,4 %
2	Ipong - Bambang Tri Wahono	7.414	29,8%	

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan diolah oleh penulis

Selisih perolehan suara terbesar terjadi di Kecamatan Sampung yaitu 40,4 %, perolehan suara yang berbeda jauh ini menarik penulis untuk mengetahui faktor penyebab berkurangnya

ketertarikan masyarakat abangan, santri, dan priyayi terhadap petahana dengan melihat jalannya marketing politik (*political marketing*).

1.3 Penelitian Terdahulu

Fautanu, dkk dengan artikel yang berjudul “Politik Identitas dalam Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017: Perspektif Pemikiran Politik Nurcholish Madjid”. Penelitian yang penulis tampilkan diatas menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pembahasan politik identitas masyarakat muslim DKI Jakarta yang dilandasi pada agama. Gambaran politik identitas masyarakat Muslim di DKI Jakarta berbentuk ukhuwah Islamiyah serta condong kepada faktor budaya dan keagamaan. Kemudian ini dilaksanakan dalam rangka menyukseskan kampanye politik serta menggerakkan masyarakat muslim sebagai bentuk politik identitas dalam mendukung kemenangan pasangan calon Anis-Sandi dalam Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017.

Rivan yang membahas mengenai politik identitas dengan judul “Politik Identitas Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018”. Teori yang digunakan pada skripsi ini adalah teori politik identitas yang dipopulerkan oleh Pierre Van den Bergh dimana terdapat dua dimensi yaitu konstruksionis dan instrumentalis. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pada artikel penelitian ini terlihat bahwa pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara terdapat penggunaan politik identitas untuk menarik masyarakat memilih suatu pasangan calon. Strateginya adalah dengan memasang calon dari daratan dan kepulauan, munculnya isu identitas daratan serta kepulauan sering digunakan untuk kepentingan politik praktis. Isu mengenai identitas etnis dikonstruksi dan diinstrumenkan sesuai dengan keadaan serta tujuan elit politik ataupun tim kemenangan dalam kontestasi pemilu agar menarik simpati masyarakat. yang berujung pada naiknya suara salah satu pasangan calon.

Penelitian ketiga merupakan artikel yang ditulis oleh Dauliy, dkk dengan judul “Politik identitas pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018”. Pada penelitian ini digunakan metode kualitatif deskriptif yang memfokuskan perhatiannya terhadap fenomena yang bersifat aktual pada saat penelitian ini dilakukan. Dalam penelitian ini terdapat beberapa penemuan yang dapat menggambarkan bagaimana politik identitas dimanfaatkan untuk mendapatkan suara dan simpati masyarakat. Isu politik identitas digunakan oleh tim ERAMAS melalui pendekatan kepada tokoh adat serta agama, sedangkan tim DJOSS menggunakan strategi pendekatan kepada tokoh adat diberbagai daerah saja. Kemudian pola politik identitas yang dilakukan tim ERAMAS berbentuk kegiatan keagamaan seperti safari dakwah dengan ustadz terkemuka, dan

ikut serta dalam kegiatan adat masyarakat. Tim pemenangan DJOSS melakukan pendekatan secara adat serta ikut terlibat langsung dalam kegiatan adat, dan untuk pendekatan agama hanya dilakukan dengan kunjungan ke tokoh agama saja.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan adalah menganalisis politik identitas dalam perolehan suara petahana pada pemilihan umum kepala daerah kabupaten ponorogo tahun 2020. Meskipun metode yang dilakukan sama dengan penelitian Fautanu dkk, Rivani, dan Dauliy dkk yaitu menggunakan kualitatif deskriptif, tetapi analisis datanya sangat berbeda yaitu dengan menggunakan indikator marketing politik 4P oleh Niffeneger.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab tidak terpilihnya kembali petahana pada pemilihan umum kepala daerah kabupaten ponorogo Tahun 2020 dengan melihat pandangan masyarakat abangan, santri, dan priyayi yang sering digunakan sebagai objek politik identitas.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif merupakan penggunaan kata-kata dan perbuatan orang dilingkungannya sebagai data penelitian untuk mengetahui gambaran serta kesimpulan yang digeneralisasi mengenai obyek/peristiwa yang diteliti secara akurat dan faktual. Penulis memilih menggunakan pendekatan kualitatif karena untuk memahami secara menyeluruh tentang bagaimana politik identitas pada pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 mempengaruhi suara petahana.

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, studi pustaka, serta dokumentasi. Penulis melakukan wawancara *semi structured* yang diawali dengan bertanya sesuai dengan pedoman yang dibuat secara terstruktur, kemudian ditelusuri lebih dalam oleh interviewer guna memperoleh keterangan lebih lengkap dan akurat. Penulis melakukan wawancara kepada budayawan serta pengamat politik yang masing-masing berjumlah 1 orang, masyarakat abangan, masyarakat santri, dan masyarakat priyayi yang masing-masing berjumlah 2 orang. Data studi pustaka penulis dapatkan dari beberapa sumber di media online yang berkaitan dengan eksistensi petahana. Dokumentasi penulis dapatkan dari hasil rekaman wawancara dengan para narasumber. Guna menganalisis data yang akan didapatkan, penulis menggunakan

Teori Marketing Politik oleh Niffeneger yang mengukur dimensi Produk, Promosi, Harga, dan Tempat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Definisi Masyarakat Abangan, Santri, dan Priyayi Menurut Budayawan

Definisi masyarakat abangan, santri, dan priyayi penulis peroleh dari hasil wawancara dengan Bapak Agus Miswanto Brotonegoro selaku budayawan yang sering terlibat masalah kebudayaan, adat dan tradisi di Kabupaten Ponorogo pada tanggal 10 Januari 2023. Beliau mengatakan bahwa. Dalam kehidupan bermasyarakat, masyarakat abangan santri dan priyayi di era ketika terjadi pergerakan indonesia menuju merdeka. Disana terjadi semacam pergerakan (pemberontakan kepada pemerintahan hindia belanda). Masyarakat abangan adalah orang-orang yang termaktub dalam masyarakat budaya. Masyarakat santri merupakan suatu komunitas atau suatu bentuk kelompok yang mengadopsikan diri sebagai orang yang melaksanakan kegiatannya berdasarkan agama islam. Masyarakat priyayi adalah mereka yang keturunan ningrat, kerabat keraton yang mempunyai garis keningratan tertentu dari kasunanan maupun kesultanan sebagai bentuk pemerintahan pada masa itu. Di jaman sekarang, ada pergeseran semangat masyarakat abangan maupun priyayi, semangatnya bukan lagi berjuang meraih kemerdekaan akan tetapi menjaga kemerdekaan agar tetap utuh. Untuk itu pada masa sekarang, masyarakat abangan merupakan orang-orang yang tergerak dalam masyarakat budaya, yang masih tetap menjaga dan melestarikan budaya lokal walaupun dengan beberapa ritualnya. Masyarakat santri pada era dahulu dengan sekarang memiliki makna yang sama yaitu melakukan kegiatannya berdasarkan agama. Kemudian masyarakat priyayi pada era sekarang dapat terlihat melalui orang-orang yang duduk di pemerintahan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat luas.

3.2 Politik Identitas Digunakan Dalam Pendekatan terhadap Masyarakat Abangan, Santri. Dan Priyayi di Kecamatan Sampung

Pendekatan yang dilakukan dalam rangka untuk meraih simpati masyarakat khususnya masyarakat abangan, santri, dan priyayi. Pendekatan melalui berbagai kunjungan kemasyarakat akan memberikan citra merakyat dan menghilangkan kesan elitis pada seorang pemimpin. Kemudian permasalahan dan kebutuhan masyarakat juga akan tahu secara langsung, hal tersebut menjadi keinginan dan harapan setiap masyarakat kepada pemimpinnya didaerah. Penulis menggunakan 3 (tiga) indikator dari Marketing Politik 4P untuk mengetahui sejauh mana politik identitas digunakan dalam pendekatan terhadap masyarakat abangan, santri, dan

priyayi di Kecamatan Sampung. Beberapa indikator tersebut yaitu (1) bentuk kunjungan, (2) intensitas kunjungan, dan (3) penyelenggaraan kampanye pada masyarakat abangan, santri dan priyayi. Salah satu program petahana yaitu melakukan safari sholat subuh berjamaah pada setiap desa di kabupaten Ponorogo. Dalam kunjungannya dimulai pukul 04.00 pagi dengan melakukan sholat berjamaah bersama perangkat desa setempat serta wakil bupati, sekretaris daerah, dan beberapa kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Di kecamatan sampung, setelah melakukan kegiatan sholat subuh berjamaah, rombongan bupati melakukan kunjungan ke MTs Negeri Sampung yang bersebelahan dengan Masjid K.H Abdurrahman untuk berdialog dengan muspika dan Kepala Desa Se-Kecamatan Sampung. Kegiatan ini mampu menarik simpati masyarakat terhadap petahana dan berpandangan baik terhadap program ini. Kemudian membahas mengenai penantang petahana pada pemilihan umum kepala daerah tahun 2020 kabupaten ponorogo yang dikenal sebagai pelaku seni serta cukup terampil dalam memainkan seni, masyarakat yang berlatar belakang budaya dan memiliki minat pada budaya menjadi tertarik kepada calon penantang dan tentu menjadi nilai tambah yang menguntungkan bagi penantang.

Kunjungan ke masyarakat merupakan salah satu pendekatan yang dapat dilakukan pasangan calon kepala daerah untuk meraih simpati dan dukungan. Di kecamatan sampung cenderung menguntungkan penantang karena banyak memiliki relasi. Beberapa kesempatan, penantang petahana lebih sering melakukan kunjungan kebawah khususnya pada masyarakat santri. Hal ini dapat dilihat ketika terdapat acara hajat pengajian di masyarakat kecamatan sampung, penantang petahana menyempatkan hadir pada acara tersebut sehingga membuat masyarakat senang ketika berinteraksi secara langsung. Disamping itu, penantang petahana juga lebih intens dalam pendekatan terhadap tokoh budaya reyog yang berakibat pada bersimpatinya para pelaku budaya atau anggota komunitas reyog terhadap penantang petahana. Dapat dilihat bahwa hal kecil seperti interaksi secara langsung dari penantang petahana atau seorang pemimpin dengan masyarakat di kecamatan sampung ternyata mampu membuat masyarakat senang. Kemudian pendekatan secara intens terhadap tokoh kelompok tertentu dapat menarik simpati dari anggota kelompok tersebut.

Berlanjut pada indikator ketiga yang mengukur sejauh mana promosi pasangan calon dilakukan di kecamatan sampung untuk menarik masyarakat abangan, santri, dan priyayi. Promosi pasangan calon kepala daerah dapat dilakukan dengan menggelar acara yang menghadirkan masyarakat secara massal ditempat tertentu. Pengadaan sebuah acara sebagai media dalam rangka untuk mengenalkan pasangan calon, menyebarkan visi dan misi, serta program kerja. Petahana diuntungkan dengan jabatannya karena beberapa kebijakan yang

dipandang baik sehingga secara tidak langsung terjadi promosi terhadap petahana yang dapat menarik minat masyarakat. Salah satu kebijakan yang secara tidak langsung memberikan penilaian positif dari masyarakat santri kepada petahana adalah pemberangkatan umroh marbot masjid dan tokoh agama di kecamatan sampung yang berjumlah 15 orang marbot masjid dan tokoh agama.

3.3 Pandangan Masyarakat Abangan, Santri, dan Priyayi di Kecamatan Sampung Terhadap Petahana

Pandangan masyarakat terhadap personal dan kinerja dari petahana maupun penantang petahana digunakan sebagai pertimbangan masyarakat untuk memilih pilihan politiknya pada pemilihan umum kepala daerah kabupaten ponorogo Tahun 2020. Pandangan mengenai personal serta kinerja yang baik tentu dapat menarik perhatian masyarakat, untuk itu penulis melakukan wawancara dengan 4 (empat) indikator. Indikator tersebut adalah (1) pandangan masyarakat terhadap kinerja petahana pada masa lampau, (2) jargon pasangan calon, (3) kenyamanan terhadap latar belakang calon, dan (4) pandangan masyarakat mengenai citra positif pasangan calon. Membahas mengenai indikator pertama yang berhubungan dengan kinerja petahana pada masa lampau tentu menjadi penilain tersendiri bagi masyarakat serta dijadikan patokan untuk menentukan pilihan politik pada pemilihan umum kepala daerah periode yang akan datang. Kinerja petahana pada masa lampau dapat terlihat dari Kebijakan pengembangan seni reyog Ponorogo melalui pentas “11-an” yang sebenarnya mempunyai maksud dan tujuan yang baik guna melahirkan penari serta pemusik yang berkualitas pada setiap desa. Pentas Reyog yang diselenggarakan setiap bulan pada setiap desa di Kabupaten Ponorogo diharapkan dapat mengembangkan budaya dan melestarikannya serta membangkitkan perekonomian masyarakat sekitar melalui sebuah *event* bulanan. Namun, dinamika mengenai kebijakan ini justru terjadi di masyarakat khususnya Kecamatan Sampung. Masyarakat menilai masih ada hal mendasar yang harus dikerjakan pemerintah daerah kabupaten ponorogo daripada membuat *event* “11-an” yaitu membuat infrastruktur jalan menjadi lebih layak lagi. Kemudian jika kinerja petahana dilihat dari kultur masyarakatnya, justru masyarakat akan senang dan lebih berempati jika pemimpin lebih sering menjenguk masyarakatnya. Akan tetapi hal tersebut dipandang kurang dimiliki oleh pasangan calon petahana selama periode jabatannya.

Berbicara mengenai indikator yang kedua yaitu jargon pasangan calon, Petahana mempunyai jargon yang sering digaungkan untuk menarik perhatian masyarakat. pada pemilihan umum kepala daerah periode sebelumnya, petahana intens menggaungkan jargon

“Emoh Ngapusi, Emoh Korupsi”. Hal ini diwujudkan dalam promosi banner-banner yang terpasang dipinggir jalan. Nampaknya jargon ini menarik perhatian masyarakat sehingga petahana di periode pertama terpilih menjadi kepala daerah. Kemudian pada pemilihan umum kepala daerah kabupaten ponorogo Tahun 2020, petahana merubah jargonnya menjadi “Menjaga Amanah dan Menuntaskan yang Tertunda”. Jargon petahana di periode pertama kepemimpinannya mungkin dapat mempengaruhi dan menarik perhatian masyarakat karena promosinya yang begitu gencar. Akan tetapi di periode kedua, masyarakat tidak lagi melihat jargon pasangan calon disamping promosinya tidak se gencar pada pemilihan umum kepala daerah periode sebelumnya. Pada pemilihan periode 2020 yang lalu masyarakat mulai melihat kinerja selama periode jabatan sebelumnya yang berakhir kepada kurang puasnya masyarakat terhadap kinerja petahana. Kemudian kenyamanan terhadap latar belakang calon lebih condong mengunggulkan penantang petahana. Penantang petahana justru lebih dikenal masyarakat tentang kesederhanaan dan kemampuannya berbaur dengan masyarakat. Namun sebaliknya, petahana dipandang masyarakat cenderung elitis dan kurang dapat berbaur. Kemudian mengenai citra pasangan calon pada pemilihan umum kepala daerah kabupaten ponorogo Tahun 2020, tidak terdapat isu citra negatif pada masyarakat kecamatan sampung

3.4 Faktor Penyebab Berkurangnya Suara Terhadap Petahana di Kecamatan Sampung

Berkurangnya suara petahana yang berujung pada kekalahan pada pemilihan umum kepala daerah kabupaten ponorogo Tahun 2020 terjadi karena beberapa faktor yang menurut masyarakat kebijakan ataupun kinerja seperti yang sudah dijelaskan pada penjelasan diatas dirasa kurang maksimal. Untuk mengetahui faktor berkurangnya minat masyarakat untuk memilih kembali pada kontestasi pemilihan umum kepala daerah kabupaten ponorogo, penulis menggunakan beberapa indikator yaitu (1) paradigma partai, identitas ideologis, dan program kerja partai pendukung, (2) produk politik/kebijakan yang dikeluarkan kepada masyarakat, (3) ketersediaan dana kampanye. Berhubungan dengan partai pendukung pasangan calon dengan sumber daya dan strategi partai yang dimiliki oleh petahana, masyarakatlah yang akhirnya menentukan pilihannya dengan menilai personal pasangan calon. Berbagai upaya yang dilakukan partai politik melalui orang-orang partai untuk mempengaruhi masyarakat tidak akan berjalan dengan baik jika personal yang diusung tidak sesuai dengan pilihan masyarakat, sekalipun partai pengusung memperoleh kemenangan di kecamatan sampung, dan berbasis partai islam ataupun yang lainnya juga tidak dapat mempengaruhi. Dalam merebut ketertarikan masyarakat terhadap personal pasangan calon dapat dilakukan melalui terjun kemasyarakat secara langsung dan melakukan kinerja yang baik.

Beranjak kepada indikator kedua yang membahas mengenai produk politik/kebijakan yang dikeluarkan, kebijakan petahana selama menjabat dipandang baik oleh masyarakat, akomodasi kegiatan budaya dan keagamaan sudah dilakukan dalam rangka menggerakkan perekonomian di desa-desa dan membangun kultur yang lebih islami melalui program sholat subuh berjamaah. Akan tetapi ada beberapa hal berjalan tidak maksimal seperti pendanaan yang kurang membuat permasalahan pada masyarakat muncul sehingga timbul rasa kurang puasnya masyarakat. Kemudian beberapa pembangunan infrastruktur sudah dilakukan akan tetapi salah dalam pengelolaan dan perencanaan sehingga timbul reaksi yang kurang baik dimasyarakat. Indikator ketersediaan dana kampanye setelah dilakukan wawancara menunjukkan bahwa dana kampanye yang lebih besar daripada petahana yang digunakan untuk keperluan kampanye menguntungkan pasangan calon penantang karena media promosi juga pasti akan lebih banyak. Kemudian kedekatan pasangan penantang kepada masyarakat mampu membuat pemilih bersimpati kepada pasangan penantang sehingga dianggap lebih menguntungkan karena promosi berjalan dari masyarakat itu sendiri. Petahana diuntungkan dengan sedikitnya dana kampanye yang dikeluarkan karena dimasyarakat tentu sudah dikenal citra personalnya melalui beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Politik identitas ternyata masih menarik untuk digunakan para calon kepala daerah kabupaten ponorogo dalam rangka menggapai suara dan simpati masyarakat. Sama halnya dengan temuan penelitian Fautanu dkk, politik identitas efektif digunakan untuk menarik simpati masyarakat pada pilkada DKI Jakarta dan dapat menggerakkan masyarakat muslim dalam mendukung pemenangan pasangan calon Anies-Sandi (Fautanu, dkk, 2017). Begitu juga dengan pemilukada tahun 2020 di kabupaten ponorogo, politik identitas yang berfokus untuk memperoleh simpati masyarakat abangan, santri, dan priyayi juga efektif dalam pemenangan pasangan calon kepala daerah disamping sorotan terhadap kinerja petahana. Dalam hubungannya dengan masyarakat abangan di kabupaten ponorogo khususnya pada kecamatan sampung, penantang petahana dipandang lebih mampu berbaur dengan masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan kemampuan penantang petahana dalam memainkan alat musik reyog dan sebagai pelaku seni menjadi nilai tambah. Hubungan kepada masyarakat santri juga dipandang lebih baik penantang petahana, hal ini dapat terlihat dari seringnya penantang petahana menghadiri acara keagamaan di kecamatan sampung daripada petahana itu sendiri. Kemudian hubungan penantang petahana dengan masyarakat santri di pondok pesantren Gontor juga sangat baik, dimana ini menjadi daya tarik bagi masyarakat santri untuk memilih penantang

petahana. Masyarakat priyayi di kecamatan sampung dalam pandangannya terhadap petahana dianggap kurang mampu merubah kondisi infrastruktur khususnya jalan yang ada di kecamatan sampung. Untuk itu dengan semua kedekatan dan kemampuan berbaur kepada masyarakat yang dimiliki penantang petahana serta kinerja yang dinilai oleh masyarakat terhadap petahana berujung pada terpilihnya penantang petahana sebagai kepala daerah kabupaten ponorogo yang baru.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Kecamatan Sampung, serta analisis yang dilakukan penulis menggunakan teori Marketing Politik 4P untuk mengetahui penyebab hilangnya ketertarikan masyarakat kepada petahana pada pemilihan umum kepala daerah kabupaten ponorogo Tahun 2020. Peneliti dapat menarik kesimpulan yaitu penantang petahana dalam mendekati masyarakat khususnya di kecamatan sampung dipandang lebih berhasil dibandingkan pasangan calon petahana itu sendiri. Hal ini karena pendekatan terhadap tokoh agama dan kemampuan penantang petahana dalam memainkan kesenian reyog menjadi daya tarik bagi masyarakat kecamatan sampung. Hal mendasar yang menjadi kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur jalan yang memadai jarang ada di kecamatan sampung, masih banyak infrastruktur jalan yang rusak dan tidak diperbaiki. Kemudian event budaya “11-an” tidak sepenuhnya memiliki dana besar, yang kemudian mau tidak mau swadaya dana harus dilakukan dan itu dipandang sedikit memberatkan masyarakat.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan waktu penelitian. Dengan waktu penelitian yang penulis peroleh tidak cukup untuk memperoleh informasi lebih dalam dan membuat informan yang penulis dapatkan terbatas.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari bahwa masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada fokus pembahasan yang sama yaitu mengenai fenomena politik identitas pada pemilihan kepala daerah.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan ungkapan terima kasih kepada Camat Sampung Drs. Setiyo Hari Sujatmiko, A.P. beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian di Kecamatan Sampung guna mendapatkan hasil yang bermanfaat bagi pengembangan keilmuan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Geertz, Clifford. (1989). *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Gulo, W. (2002). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Huda, Ni'matul. (2014). *Ilmu Negara*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Marijan, Kacung. (2010). *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhtar, dkk. (2017). *Ketika Mahasiswa Bicara Pilkada*. Malang: UB Press.
- Syafii, Ahmad. (2010). *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*. Jakarta: Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD).
- Sandu & Ali. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suwendra, I Wayan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, dan Keagamaan*. Bandung: Nilacakra.
- Aditya, Zaka Winata, M. R. (2018). "Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia". *Negara Hukum*, 9(1), 79–100. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4012/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia/>
- Andriyani, L. (2019). Politik Identitas Di Pemilu Serentak 2019. *Jurnal Demokrasi*, 4(1)
- Dauliy, S. M., Kusmanto, H., & Kadir, A. (2019). "Politik Identitas Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2018". *Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal*, 9(1), 51. <https://doi.org/10.31289/jap.v9i1.2230>
- Fautanu, I., M, B., & Gunawan, H. (2020). "Politik Identitas dalam Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017: Perspektif Pemikiran Politik Nurcholish Madjid". *Politicon*, 2(2), 87–112.
- Herdiansah, A. G. (2017). Politisasi Identitas dalam Kompetisi Pemilu di Indonesia Pasca 2014. *Jurnal Bawaslu*, 3(2), 169–183.
- Niffenegger, P.B. (1989). "Strategies for Success from the Politic Marketers". *Journal of Consumer Marketing*, Vol. 30, No. 10/11, pp. 45-51
- Nasrudin, J. (2019). *Politik Identitas dan Representasi Politik*. 1, 34–47. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Salman, Leli. (1998). "POLITIK IDENTITAS: Ancaman Terhadap Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Negara Pancasila". *Jurnal Aspirasi*, 77–90. FISIP UNWIR Indramayu
- Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. *In Angewandte Chemie*

International Edition, 6(11), 951-952. (Issue 465). ALFABETA, CV.

- Sofianto, A. (2015). "Peran Agama Terhadap Perilaku Pemilih Dalam Pemilu Legislatif 2014 Di Jawa Tengah". 161–172.
- Subair. (2015). "Abangan, Santri, Priyayi: Islam dan Politik Identitas Kebudayaan Jawa". *Jurnal Dialektika*, 9(2), 34-46
- Sutrisno, S., Yuningsih, N. Y., & Agustino, L. (2018). "Komparasi Teori Marketing Politik 4p Menurut Niffenegger dan 3p Menurut Adman Nursal". *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 6(2), 106.
<https://doi.org/10.31289/jppuma.v6i2.1617>
- A. dkk. (2020). *Deklarasi Ipong-Bambang, Diusung 6 PARPOL total 36 kursi, Berita rri Ponorogo*. Diperoleh dari: <https://mediaponorogo.com/2020/09/03/deklarasi-ipong-bambang-diusung-6-parpol-total-36-kursi/> (Diakses: 14 September, 2022).
- LSI. (2017). *Kajian Bulanan Edisi 2 Tahun 2007*. Diperoleh dari: <https://www.lsi.or.id> (Diakses: 18 September, 2022).
- Publishers, H.C. (2022) *The American Heritage Dictionary Entry: Incumbent, American Heritage Dictionary Entry: incumbent*. Diperoleh dari: <https://ahdictionary.com/word/search.html?q=incumbent> (Diakses: 18 September, 2022).
- Purnamasari, D.D. (2020) *Petahana Cenderung Makin Mendominasi di Pilkada 2020, kompas.id*. Harian Kompas. Diperoleh dari: <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2020/09/10/petahana-masih-mendominasi-di-pilkada-2020> (Diakses: 18 September, 2022).
- TIM 20 Detik. (2022). *Reog Di Ponorogo Pentas Secara Bersamaan Setiap Tanggal 11*. 20 Detik. Diperoleh dari: <https://20.detik.com/e-flash/20221201-221201088/reog-di-ponorogo-pentas-secara-bersamaan-setiap-tanggal-11> (Diakses: 30 April 2023)
- Ponorogo. (2017). *Subuh Berjamaah Bersama Bupati*. Ponorogo.go.id. Diperoleh dari: <https://sampung.ponorogo.go.id/2017/03/10/subuh-berjamaah-bersama-bupati/> (Diakses: 1 Mei 2023)